



KLIPING PERPUSTAKAAN DPR-RI

<http://kliping.dpr.go.id>

Judul	: Merger Telkomsel-Indihome, Darmadi: Opsi Logis Dan Sangat Relevan
Tanggal	: Minggu, 09 April 2023
Surat Kabar	: Rakyat Merdeka
Halaman	: 6

Merger Telkomsel-Indihome Darmadi: Opsi Logis Dan Sangat Relevan



Darmadi Durianto

KOMISI VI DPR mengapresiasi langkah Kementerian BUMN melebur anak usaha PT Telkom (Persero) Tbk yakni PT Telkomsel dengan Indihome. Langkah tersebut dinilai cukup realistik di tengah upaya Telkom yang terus berupaya meningkatkan ekspansi bisnis digitalnya.

Anggota Komisi VI DPR Darmadi Durianto menilai, rencana penggabungan tersebut bisa dikatakan sebagai salah satu strategi bisnis yang cukup progresif.

“Agar gesit dan lincah memang harus dirampingkan postur bisnisnya. Efisiensi merupakan keniscayaan di era serba digital saat ini. Jadi upaya melebur Telkomsel dengan Indihome adalah opsi yang paling logis dan relevan,” kata dia.

Selain itu, Darmadi menilai, upaya Kementerian BUMN yang ingin mendelusi kepemilikan Singtel melalui aksi korporasi dengan melakukan penggabungan Indihome dan Telkomsel patut diberikan dukungan yang memadai.

Menurutnya, porsi kepemilikan kita memang size-nya perlu diperbesar, mengingat Indonesia adalah pasar terbesar dalam hal teknologi informasi.

“Kami di DPR mendukung penuh upaya Kementerian BUMN dan Telkom dalam bernegosiasi dengan pihak Singtel. Kami berharap apa yang dicita-citakan dapat tercapai,” ujar politisi senior Fraksi PDI Perjuangan ini.

Dia mengatakan, jika mengacu pada laporan keuangan Telkomsel tahun buku 2021, kepemilikan Singtel di Telkomsel saat ini sebesar 35 persen dan sisanya 65 persen dimiliki oleh PT Telkom Indonesia Persero Tbk (TLKM). Kendati demikian, dia mewanti-wanti agar aksi korporasi ini tidak berdampak pada para karyawannya.

“Jangan sampai aksi korporasi tersebut justru berujung pada Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) karyawan. Kami harap ini dipikirkan. Buat apa melakukan aksi korporasi jika anak bangsa justru nantinya jadi korban alias di-PHK. Walau saya yakini ini tidak akan terjadi,” ujar Bendahara Umum Megawati Institute ini.

Dia juga mendorong agar aksi korporasi Telkom tersebut terlebih dahulu dilakukan peninjauan secara terukur oleh lembaga pengawas persaingan usaha. Hal itu penting dilakukan guna menghindari potensi akan adanya gugatan yang dapat terjadi kapan saja.

“Perlu review Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) atas aksi korporasi Telkom. Sebaiknya meminta saran dan masukan juga ke KPPU agar aksi korporasi yang akan dilakukan semuanya *base on* aturan hukum yang berlaku,” tandasnya. ■ KAL